MODUL PIMPINAN KOMISARIAT



PIMPINAN WILAYAH
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
JAWA TIMUR



MODUL PIMPINAN KOMISARIAT

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA



Pimpinan Wilayah

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab

Choirul Mubtadi'in (Ketua PW IPNU Jatim)

Nurul Hidayati (Ketua PW IPPNU Jatim)

Pengarah

(Muhammad Wakil Ketua Bid. Jaringan Sekolah PW IPNU Jatim)

Penyusun

Fajrul Falah

Ahmad Nur Wahid

Cresnanda Wanda

Puput Kurniawati

Desain Cover

Wiwin Setiowati

Layout

Fajrul Falah

Penerbit

Pimpinan Wilayah

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

Jl Masjid Al Akbar Surabaya No. 09



KATA PENGANTAR

KH. Marzuki Mustamar (Ketua PW NU Jawa timur)

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya lah sampai hari ini kita msih diberikan kesehatan sehingga masih menunaikan khidmat pada agama, bangsa dan Negara. Sholawat serta salam semoga tetap selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) khususnya para santri dikalangan pesantren sudah sepatutnya menyiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, mereka harus mempunyai semangat untuk mahir spiritual dan intelektual. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi para orang tua, guru dan kyai.

Semoga dengan hadirnya buku ini adalah menjadikan sebuah ikhtiar untuk membentuk para santri untuk menjadi lebih bermanfaat kepada agama, bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

KH. Marzuki Mustamar



KATA PENGANTAR

M. Choirul Mubtadi'in (Ketua PW IPNU Jatim)

Nurul Hidayati (Ketua PW IPPNU Jatim)

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamin, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan modul ini. Shalawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad penulis sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Setiap zaman ada orangnya, setiap orang punya zamanya. lengkap dengan problematika dan persoalan yang di hadapi. Jika keadaan berubah, maka strategpun tidak bisa sama. Jika persoalan menyerang dengan berbeda, maka pola berorganisasipun juga jarus diubah. Begitulah rumusan dalam berorgasisasi yang harus selalu tanggap dengan perubahan zaman. Salah satu point penting dalam hal ini adalah penataan kelembagaan. Membahas lebih dalam lagi tentang menata internal organisasi serta melakukan managerial lain agar lebih tertata, rapi dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini kami melakukan turba

(turun kebawah). Setelah kami melihat, mengamati dan mengkaji bahwa perlu adanya pakem kusus yang disajikan secara general dalam sistem dan mekanisme pengkaderan, sehingga bisa dikonsumsi dan dipahami dengan mudah oleh semua elemen pelajar. Juga melihat banyaknya kader pelajar NU baik struktur maupun kultural di Jawa Timur yang belum begitu akrab dengan Nahdlatul ulama, maka kami membuat, mengkaji, mentabayunkan kepada para pakar dan kemudian menerbitkan modul yang berjudul Modul Pimpinan Komisariat. Maka kami perlu menjawab problematika tersebut dan merealisasikannya melalui buku ini. Modul ini disusun untuk memenuhi permintaan kebutuhan panduan untuk Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dengan teknik penyajiannya dilakukan secara terpadu berdasarkan pemilahan jenjang pendidikan. Seperti layaknya sebuah modul, maka pembahasan dimulai dengan menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dan disertai dengan soal yang mengukur tingkat penguasaan materi setiap topik. Dengan demikian pengguna modul ini secara mandiri dapat mengukur tingkat ketuntasan yang dicapainya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini tentu punya banyak kekurangan. Untuk itu kami dengan berlapang dada menerima masukan dan kritikan konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Wallohul muwafiq illa aqwamittorieq.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Surabaya, 17 Juni 2019

Pimpinan Wilayah

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

M. Choirul Mubtadi'in	Nurul Hidayati
Ketua IPNU	Ketua IPPNU

DAFTAR ISI

BAB I
PROFIL IPNU-IPPNU

A. VISI MISI

1. Visi dan Misi IPNU

Visi :

Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham a*hlussunnah wal jama'ah* yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi:

a. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi
b. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
c. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (*maslahah al-ammah*), guna terwujudnya *khaira ummah.*
d. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi

2. Visi dan Misi IPPNU

Visi :

Terbentuknya kesempurnaan Pelajar Putri Indonesia yang bertaqwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan.

Misi:

a. Membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Mengembangkan wacana dan kualitas sumberdaya kader menuju terciptanya kesetaraan gender.
c. Membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif

B. LANDASAN BERFIKIR

Sebagaimana ditetapkan dalam khittah 1926, Aswaja (*Ahlussunnah wal jamaah*) adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak bagi warga Nahdliyin. Sikap dasar itu yang menjadi watak IPNU-IPPNU, dengan watak keislamannya yang mendalam dan dengan citra keindonesiaannya yang matang.

1. Cara Berfikir. Cara berfikir menurut IPNU-IPPNU sebagai manifestasi *ahlussunah wal jama'ah* yang beraqidah mengikuti salah satu madhab Hanafi,

Maliki, Syafi'i, dan Hambali yaitu cara berfikir teratur dan runtut dengan memadukan antara dalil naqli (yang berdasar al-Qur'an dan Hadits) dengan *dalil aqli* (yang berbasis pada akal budi) dan *dalil waqi'i* (yang berbasis pengalaman). Karena itu, disini IPNU-IPPNU menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (*liberal thinkers*) dan kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir materialistis (paham kebendaan). Demikian juga IPNU-IPPNU menolak pemahaman dzahir (lahir) dan kelompok tekstual (literal), karena tidak memungkinkan memahami agama dan kenyataan sosial secara mendalam.

2. Cara Bersikap. IPNU-IPPNU memandang dunia sebagai kenyataan yang beragam. Karena itu keberagaman diterima sebagai kenyataan. Namun juga bersikap aktif yakni menjaga dan mempertahankan kemajemukan tersebut agar harmonis (selaras), saling mengenal (*lita'arofu*) dan memperkaya secara budaya. Sikap moderat (selalu mengambil jalan tengah) dan menghargai perbedaan menjadi semangat utama dalam mengelola kemajemukan tersebut. Dengan demikian IPNU-

IPPNU juga menolak semua sikap yang mengganggu keanekaragaman atau keberagaman budaya tersebut. Pluralitas, dalam pandangan IPNU-IPPNU harus diterima sebagai kenyataan sejarah.

3. Cara Bertindak. Dalam bertindak, Aswaja mengakui adanya kehendak Allah (taqdir) tetapi Aswaja juga mengakui bahwa Allah telah mengkaruniai manusia pikiran dan kehendak. Karena itu dalam bertindak, IPNU-IPPNU tidak bersikap menerima begitu saja dan menyerah kepada nasib dalam menghadapi kehendak Allah, tetapi berusaha untuk mencapai taqdir Allah dengan istilah *kasab* (usaha). Namun demikian, tidak harus berarti bersifat antroposentris (mendewakan manusia), bahwa manusia bebas berkehendak. Tindakan manusia tidak perlu dibatasi dengan ketat, karena akan dibatasi oleh alam, oleh sejarah. Sementara Allah tidak dibatasi oleh faktor-faktor itu. Dengan demikian IPNU-IPPNU tidak memilih menjadi sekuler, melainkan sebuah proses pergerakan iman yang mengejawantah dalam seluruh aspek kehidupan.

C. LANDASAN BERSIKAP

Semua kader IPNU-IPPNU dalam menjalankan kegiatan pribadi dan berorganisasi harus tetap memegang

teguh nilai-nilai yang diusung dari norma dasar keagamaan Islam ala *ahlussunnah wal jama'ah* dan norma yang bersumber dari masyarakat. Landasan nilai ini diharapkan dapat membentuk watak diri seorang kader IPNU-IPPNU. Nilai-nilai tersebut adalah :

1. Diniyyah/Keagamaan
    a. Tauhid (*al-tauhid*) merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT. sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak.
    b. Persaudaraan dan persatuan (*al-ukhuwwah wa al-ittihad*) dengan mengedepankan sikap mengasihi (*welas asih*) sesama makhluk.
    c. Keluhuran moral (*al-akhlaq al-karimah*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran (al-shidqu). Bentuk kebenaran dan kejujuran yang dipahami: (1) *Al-shidqu il Allah*. Sebagai pribadi yang beriman selalu melandasi diri dengan perilaku benar dan jujur, karena setiap tindakan senantiasa dilihat Sang Khalik; (2) *Al-shidqu ila ummah*. Sebagai makhluk sosial dituntut memiliki kesalehan sosial, jujur dan benar kepada masyarakat dengan senantiasa melakukan pencerahan terhadap masyarakat; (3) *Al-shidqu ila al-nafsi*, jujur dan benar kepada diri sendiri merupakan sikap perbaikan diri dengan

semangat peningkatan kualitas diri; (4) *Amar ma'ruf nahy munkar*. Sikap untuk selalu menyerukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran.

2. Keilmuan, Prestasi, dan Kepeloporan
   a. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semangat peningkatan kualitas SDM IPNU-IPPNU dan menghargai para ahli dan sumber pengetahuan secara proporsional.
   b. Menjunjung tinggi nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
   c. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.
3. Sosial Kemasyarakatan
   a. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
   b. Selalu siap mempelopori setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia

4. Keikhlasan dan Loyalitas

Menjunjung tinggi keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara dengan melakukan ikhtiar perjuangan di bawah naungan IPNU-IPPNU.

D. LANDASAN ORGANISASI

1. Ukhuwwah

Sebuah gerakan mengandalkan sebuah kebersamaan, karena itu perlu diikat dengan *ukhuwah* (persaudaraan) atau solidaritas (perasaan setia kawan) yang kuat (*al urwah al-wutsqo*) sebagai perekat gerakan. Adapun gerakan ukhuwah IPNU-IPPNU meliputi:

a. Ukhuwwah Nahdliyyah

Sebagai gerakan yang berbasis NU ukhuwah nahdliyah harus menjadi prinsip utama sebelum melangkah ke ukhuwah yang lain. Ini bukan untuk memupuk sektarianisme, melainkan sebaliknya sebagai pengokoh ukhuwah yang lain, sebab hanya kaum nahdiyin yang mempunyai sistem pemahaman keagamaan yang mendalam dan bercorak sufistik yang moderat dan selalu menghargai perbedaan serta gigih menjaga kemajemukan budaya, tradisi, kepercayaan dan agama yang ada.

Kader IPNU-IPPNU yang mengabaikan ukhuwah nahdiyah adalah sebuah penyimpangan. Sebab ukhuwah tanpa dasar aqidah yang kuat akan mudah pudar karena tanpa dasar dan sering dicurangi dan dibelokkan untuk kepentingan pribadi. Ukhuwah nahdliyah berperan sebagai landasan ukhuwah yang lain. Karena ukhuwah bukanlah tanggapan yang bersifat serta merta, melainkan sebuah keyakinan, penghayatan, dan pandangan yang utuh serta matang yang secara terus menerus perlu dikuatkan.

b. *Ukhuwwah Islamiyyah*

Ukhuwah Islamiyah mempunyai ruang lingkup lebih luas yang melintasi aliran dan madzhab dalam Islam. Oleh sebab itu ukhuwah ini harus dilandasi dengan kejujuran, cinta kasih, dan rasa saling percaya. Tanpa landasan tersebut ukhuwah islamiyah sering diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk menguasai yang lain. Relasi semacam itu harus ditolak, sehingga harus dikembangkan ukhuwah islamiyah yang jujur dan amanah serta adil.

Ukhuwah Islamiyah dijalankan untuk kesejahteraan umat Islam serta tidak diarahkan untuk menggangu ketentraman agama atau pihak yang lain. Dengan ukhuwah Islamiyah yang adil itu umat Islam Indonesia dan seluruh dunia bisa saling

mengembangkan, menghormati, melindungi serta membela dari gangguan kelompok lain yang membahayakan keberadaan iman, budaya dan masyarakat Islam secara keseluruhan.

c. *Ukhuwwah Wathaniyyah*

Sebagai organisasi yang berwawasan kebangsaan, maka IPNU-IPPNU berkewajiban untuk mengembangkan dan menjaga ukhuwah wathoniyah (solidaritas nasional). Dalam kenyataannya bangsa ini tidak hanya terdiri dari berbagai warna kulit, agama dan budaya, tetapi juga mempunyai berbagai pandangan hidup.

IPNU-IPPNU, yang lahir dari akar budaya bangsa ini, tidak pernah mengalami ketegangan dengan konsep kebangsaan yang ada. Sebab keislaman IPNU-IPPNU adalah bentuk dari Islam Indonesia (Islam yang berkembang dan melebur dengan tradisi dan budaya Indonesia); bukan Islam di Indonesia (Islam yang baru datang dan tidak berakar dalam budaya Indonesia).

Karena itulah IPNU-IPPNU berkewajiban turut mengembangkan ukhuwah wathaniyah untuk menjaga kerukunan nasional. Karena dengan adanya ukhuwah wathaniyah ini keberadaan NU, umat Islam dan agama lain terjaga. Bila seluruh bagian bangsa ini kuat, maka akan disegani bangsa lain dan mampu

menahan penjajahan –dalam bentuk apapun- dari bangsa lain. Dalam kerangka kepentingan itulah IPNU-IPPNU selalu gigih menegakkan nasionalisme sebagai upaya menjaga keutuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia.

d. *Ukhuwwah Basyariyyah*

Walaupun NU memegang teguh prinsip *ukhuwah nahdliyah*, *ukhuwah* islamiyah dan *ukhuwah wathaniyah*, namun NU tidak berpandangan dan berukhuwah sempit. NU tetap menjunjung solidaritas kemanusiaan seluruh dunia *(ukhuwah dualiyah)*, menolak pemerasan dan penjajahan (imperialisme dan neo-imperialisme) satu bangsa atas bangsa lainnya karena hal itu mengingkari martabat kemanusiaan. Bagi IPNU-IPPNU, penciptaan tata dunia yang adil tanpa penindasan dan peghisapan merupakan keniscayaan. Menggunakan isu kemanusiaan sebagai sarana penjajahan merupakan tindakan yang harus dicegah agar tidak meruntuhkan martabat kemanusiaan.

Ukhuwah basyariyah memandang manusia sebagai manusia, tidak tersekat oleh tembok agama, warna kulit atau pandangan hidup; semuanya ada dalam satu persaudaraan dunia. Persaudaran ini tidak bersifat pasif (diam di tempat), tetapi selalu giat membuat inisiatif (berikhtiar) dan menciptakan

terobosan baru dengan berusaha menciptakan tata dunia baru yang lebih adil,beradab dan terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

2. Amanah

Dalam kehidupan yang serba bersifat duniawi (kebendaan), sikap amanah mendapat tantangan besar yang harus terus dipertahankan. Sikap amanah (saling percaya) ditumbuhkan dengan membangun kejujuran, baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Sikap tidak jujur akan menodai prinsip amanah, karena itu pelakunya harus dikenai sangsi organisasi secara tegas. Amanah sebagai ruh gerakan harus terus dipertahankan, dibiasakan dan diwariskan secara turun temurun dalam sikap dan perilaku sehari-hari

3. Ibadah (Pengabdian)

Berjuang dalam NU untuk masyarakat dan bangsa haruslah berangkat dari semangat pengabdian, baik mengabdi pada IPNU-IPPNU, umat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Dengan demikian mengabdi di IPNU-IPPNU bukan untuk mencari penghasilan, pengaruh atau jabatan, melainkan merupakan ibadah yang mulia. Dengan semangat pengabdian itu setiap kader akan gigih dan ikhlas membangun dan memajukan IPNU-IPPNU. Tanpa semangat pengabdian, IPNU-IPPNU hanya dijadikan tempat mencari kehidupan, menjadi batu

loncatan untuk memproleh kepentingan pribadi atau golongan.

Lemahnya organisasi dan ciutnya gerakan IPNU-IPPNU selama ini terjadi karena pudarnya jiwa pengabdian para pengurusnya. Pengalaman tersebut sudah semestinya dijadikan pijakan untuk membarui gerakan organisasi dengan memperkokoh jiwa pengabdian para pengurus dan kadernya. Semangat pengabdian itulah yang pada gilirannya akan membuat gerakan dan kerja-kerja peradaban IPNU-IPPNU akan semakin dinamis dan nyata.

4. Asketik (Kesederhanaan)

Sikap amanah dan pengabdian serta idealisme muncul bila seseorang memiliki jiwa asketik (bersikap zuhud/sederhana). Karena pada dasarnya sikap materialistik (*hubbu al-dunya*) akan menggerogoti sikap amanah dan akan merapuhkan semangat pengabdian, karena dipenuhi pamrih duniawi. Maka, sikap zuhud adalah suatu keharusan bagi aktivis IPNU-IPPNU. Sikap ini bukan berarti anti duniawi atau anti kemajuan, akan tetapi menempuh hidup sederhana, tahu batas, tahu kepantasan sebagaimana diajarkan oleh para *salafus sholihin.* Dengan sikap asketik itu keutuhan dan kemurnian perjuangan IPNU-IPPNU akan terjaga,

sehingga kekuatan moral yang dimiliki bisa digunakan untuk menata bangsa ini.

5. Non-Kolaborasi

Landasan berorganisasi non-kolaborasi harus ditegaskan kembali, mengingat dewasa ini banyak lembaga yang didukung oleh pemodal asing yang menawarkan berbagai jasa dan dana yang tujuannya bukan untuk memandirikan, melainkan untuk menciptakan ketergantungan dan pengaburan terhadap khittah serta prinsip-prinsip gerakan NU secara umum, melalui campur tangan dan pemaksaan ide dan agenda mereka. Karena itu untuk menjaga kemandirian, maka IPNU-IPPNU harus menolak untuk berkolaborasi (bekerja sama) dengan kekuatan pemodal asing baik secara akademik, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya kader-kader IPNU-IPPNU berkewajiban membangun paradigma (kerangka) keilmuan sendiri, sistem politik dan sistem ekonomi sendiri yang berakar pada budaya sejarah bangsa nusantara sendiri.

6. Komitmen Pada Korp

Untuk menerapkan prinsip-prinsip serta menggerakkan roda organisasi, maka perlu adanya kesetiaan dan kekompakan dalam korp (himpunan) organisasi. Karena itu seluruh anggota korp harus secara bulat menerima keyakinan utama yang menjadi

pandangan hidup dan seluruh prinsip organisasi. Demikian juga pimpinan, tidak hanya cukup menerima ideologi dan prinsip pergerakan semata, tetapi harus menjadi pelopor, teladan dan penggerak prinsip-prinsip tersebut.

Segala kebijakan pimpinan haruslah mencerminkan suara seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh anggota korp harus tunduk dan setia pada pimpinan. Dalam menegakkan prinsip dan melaksanakan program, pimpinan harus tegas memberi ganjaran dan sanksi pada anggota korp. Sebaliknya, anggota harus berani bersikap terbuka dan tegas pada pimpinan dan berani menegur dan meluruskan bila terjadi penyimpangan

7. Kritik-Otokritik

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi serta memperlancar jalannya program, maka perlu adanya cara kerja organisasi. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kemandekan atau bahkan penyimpangan, maka dibutuhkan kontrol terhadap kinerja dalam bentuk kritik-otokritik (saling koreksi dan introspeksi diri). Kritik-otokritik ini bukan dilandasi semangat permusuhan tetapi dilandasi semangat persaudaraan dan rasa kasih sayang demi perbaikan dan kemajuan IPNU-IPPNU.

E. JATI DIRI IPNU-IPPNU

1. Hakikat dan Fungsi IPNU-IPPNU

   a. Hakikat

      IPNU-IPPNU adalah wadah perjuangan pelajar NU untuk menyosialisasikan komitmen nilai-nilai keislaman, kebangsaan, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran dalam upaya penggalian dan pembinaan kemampuan yang dimiliki sumber daya anggota, yang senantiasa mengamalkan kerja nyata demi tegaknya ajaran Islam *Ahlussunnah wal jamaah* dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

   b. Fungsi

      IPNU-IPPNU berfungsi sebagai:

      i. Wadah berhimpun Pelajar baik putra maupun putri NU untuk mencetak kader aqidah.
      ii. Wadah berhimpun pelajar baik putra maupun putri NU untuk mencetak kader ilmu.
      iii. Wadah berhimpun pelajar baik putra maupun putri NU untuk mencetak kader organisasi.

      Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran panggilan dan pembinaan (target kelompok) IPNU-IPPNU adalah setiap pelajar bangsa (siswa dan santri) yang syarat keanggotaannya ketentuan dalam PD/PRT.

2. Posisi IPNU-IPPNU

   a. Intern (dalam lingkungan NU)

      IPNU-IPPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan yang berdiri sendiri itu hanya dapat dibedakan dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapannya masing-masing.

   b. Ekstern (di luar lingkungan NU)

      IPNU-IPPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa Indonesia.

3. Orientasi IPNU-IPPNU

   Orientasi IPNU-IPPNU berpijak pada kesemestaan organisasi dan anggotanya untuk senantiasa menempatkan gerakannya pada ranah keterpelajaran dengan kaidah "belajar, berjuang, dan bertaqwa," yang

bercorak dasar dengan wawasan kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran.

a. Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan ialah wawasan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang mengakui keberagaman masyarakat, budaya, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hakekat dan martabat manusia, yang memiliki tekad dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi.

b. Wawasan Keislaman

Wawasan keislaman adalah wawasan yang menempatkan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dalam menunaikan segala tindakan dan kerja-kerja peradaban. Ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam, mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, IPNU-IPPNU dalam bermasyarakat bersikap *tawashut* dan *i'tidal*, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersikap membangun dan menghindari sikap *tatharruf* (ekstrem, melaksanakan kehendak dengan

menggunakan kekuasaan dan kezaliman); *tasamuh*, toleran terhadap perbedaan pendapat, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan; *tawazun*, seimbang dan menjalin hubungan antar manusia dan Tuhannya, serta manusia dengan lingkungannya; *amar ma'ruf nahy munkar*, memiliki kecenderungan untuk melaksanakan usaha perbaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan, mandiri, bebas, terbuka, bertanggung jawab dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.

c. Wawasan Keilmuan

Wawasan keilmuan adalah wawasan yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan anggota dan kader. Sehingga ilmu pengetahuan memungkinkan anggota untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan tidak menjadi beban sosial lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan, akan memungkinan mencetak kader mandiri, memiliki harga diri, dan kepercayaan diri sendiri dan dasar kesadaran yang wajar akan kemampuan dirinya dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

d. Wawasan Kekaderan

Wawasan kekaderan ialah wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota, agar menjadi kader–kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi dan cita–cita perjuangan organisasi, bertanggungjawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi, juga diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam ala *ahlussunnah wal jamaah*, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan teknis mengembangkan organisasi, kepemimpinan, kemandirian, dan populis.

e. Wawasan Keterpelajaran

Wawasan keterpelajaran ialah wawasan yang menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai *center of excellence* (pusat keutamaan) pemberdayaan sumberdaya manusia terdidik yang berilmu, berkeahlian, dan mempunyai pandangan ke depan, yang diikuti kejelasan tugas sucinya, sekaligus rencana yang cermat dan pelaksanaannya yang berpihak pada kebenaran.

Wawasan ini mensyaratkan watak organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus; mencintai masyarakat belajar; mempertajam kemampuan mengurai dan menyelidik persoalan; kemampuan menyelaraskan berbagai pemikiran agar dapat membaca kenyataan yang sesungguhnya; terbuka menerima perubahan, pandangan dan cara-cara baru; menjunjung tinggi nilai, norma, kaidah dan tradisi serta sejarah keilmuan; dan berpandangan ke masa depan

F. AQIDAH DAN ASAS

a. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama beraqidah Islam dengan menganut paham *ahlussunnah wal jamaah*.

b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

G. SIFAT DAN FUNGSI

Sifat : IPNU-IPPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan

IPNU-IPPNU berfungsi sebagai:

- Wadah perjuangan pelajar baik putra maupun putri Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran.
- Wadah kaderisasi pelajar baik putra maupun putri untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa.
- Wadah penguatan pelajar baik putra maupun putri dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam *ahlussunah wal-Jamaah* untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai nahdliyah.
- Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah *nahdliyah, islamiyah, insaniyah dan wathoniyah.*

BAB II

LANDASAN HUKUM PIMPINAN KOMISARIAN

A. NAMA DAN KEDUDUKAN

Pengertian, Kedudukan dan Daerah Kerja

1. Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (disingkat PK IPNU IPPNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah, pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya.
2. PK berkedudukan di lembaga pendidikan yang bersangkutan.
3. Daerah kerja PK meliputi seluruh wilayah dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan.

B. STRUKTUR PENGURUS

Susunan Pengurus

a. Susunan pengurus PK IPNU IPPNU terdiri dari: pelindung, dewan pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, beberapa departemen, lembaga dan badan.
b. Pelindung adalah pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
c. Dewan Pembina terdiri dari orang-orang yang dianggap mampu dan berjasa untuk IPNU IPPNU dan/atau ditentukan menurut kebijakan PK sepanjang tidak bertentangan dengan PD-PRT.
d. Ketua sebagai mandataris Rapat Anggota, dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Anggota.
e. Anggota pengurus harian PK IPNU IPPNU diangkat oleh ketua terpilih yang dibantu oleh anggota tim formatur Rapat Anggota.
f. Anggota pengurus lengkap PK IPNU IPPNU diangkat oleh ketua melalui rapat harian.
g. Pimpinan Lembaga dan Badan PK IPNU IPPNU diangkat oleh Ketua melalui rapat harian.
h. Pengurus lengkap PK disahkan oleh PC IPNU IPPNU, setelah mendapat rekomendasi dari PAC IPNU IPPNU dan kepala madrasah/sekolah.

Struktur Pengurus Pimpinan Komissariat IPNU IPPNU

Pelindun : kepala madrasah/sekolah/pondok

Pembina : Guru kesiswaan

Ketua :

Wakil ketua 1 :

Wakil ketua 2 :

Skretaris :

Wakil sekretaris :

Bendahara :

Wakil bendahara :

Departemen – Departemen

c. D. Organisasi
   - *koord*
   - *anggoota*
   - *anggota*

d. D. Kaderisasi
   - *koord*
   - *anggoota*
   - *anggota*

e. D. Dakwah
   - *koord*
   - *anggoota*
   - *anggota*

f. D. Minat & Bakat
   - *koord*
   - *anggoota*
   - *anggota*

g. Lembaga Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi	h. Lembaga Pers Pelajar
- *koord*	- *koord*
- *anggoota*	- *anggoota*
- *anggota*	- *anggota*

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Harian

1. Melaksanakan amanat rapat anggota.
2. Memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kerjanya.
3. Menghadiri setiap undangan PC dan PAC.
4. Memberikan laporan periodik (setengahtahunan) tentang kegiatan dan perkembangan organisasi secara lokal kepada PC IPNU IPPNU dan Pimpinan Lembaga Pendidikan, dengan tembusan PAC IPNU IPPNU.
5. Bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi baik ke luar maupun ke dalam secara lokal kepada Rapat Anggota
6. (6) Mensosialisasikan aturan/kebijakan yang diterbitkan PP IPNU IPPNU, PW. IPNU IPPNU, PC IPNU IPPNU dan PAC IPNU IPPNU keseluruh anggotanya.

K e t u a

1. Status dan kedudukan:
    a. Mandataris rapat anggota;
    b. Pengurus harian PK IPNU IPPNU;
    c. Pemegang kebijakan umum PK IPNU IPPNU;
    d. Koordinator umum program PK IPNU IPPNU.
2. Hak dan wewenang:
    a. Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku;
    b. Meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan pengurus yang dilakukan atas nama organisasi;
    c. Mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PK IPNU IPPNU baik ke dalam maupun ke luar;
    d. Memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK IPNU IPPNU yang dianggap tidak menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya, dan disahkan melalui rapat harian;
    e. Bersama bendahara atau wakil bendahara mendisposisi pengeluaran-pengeluaran rutin PK IPNU IPPNU;
    f. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi;

g. Memberikan mandat kepada wakil ketua atau pengurus harian dalam hal ketua berhalangan tidak tetap, melalui rapat harian.

3. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:
   a. Memimpin dan mengendalikan organisasi PK IPNU IPPNU secara umum;
   b. Mengkoordinir pelaksanaan program secara umum;
   c. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PK IPNU IPPNU;
   d. Mengevaluasi secara umum program PK IPNU IPPNU dan kegiatan-kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama periode kepengurusan;
   e. Melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka pengembangan organisasi, dengan tetap mengacu kepada hasil-hasil kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang dan konferensi anak cabang dan rapat anggota;
   f. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi secara lokal;
   g. Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi secara umum kepada rapat anggota.

Wakil – Wakil Ketua

(1) Wakil ketua adalah pengurus harian yang bertugas membantu ketua PK IPNU IPPNU untuk melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.

(2) Wakil ketua PK IPNU IPPNU membawahi departemen sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan..

(3) Wakil ketua PK IPNU IPPNU sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat).

(4) Unsur wakil ketua sekurang-kurangnya terdiri wakil ketua bidang organisasi dan wakil ketua bidang kaderisasi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PK IPNU IPPNU;
b. Pemegang kebijakan khusus PK IPNU IPPNU, pada bidang organisasi;
c. Koordinator pelaksanaan program pada bidang organisasi yang telah ditetapkan.

(2) Hak dan wewenang:

a. Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan berdasarkan surat mandat dari ketua, atau keputusan rapat harian;
b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan program pengembangan dan penataan organisasi;
c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kaitan dengan pengembangan dan penataan organisasi;
d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK IPNU IPPNU yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;
e. Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan bidang organisasi bersama sekretaris atau wakil sekretaris bidang organisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, pada bidang organisasi;
b. Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas dalam hal ketua berhalangan;

c. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan program bidang organisasi;
d. Mengelola dan mengkoordasikan pelaksanaan program-program pada departemen yang dibawahinya;
e. Melakukan pembinaan dan koordinasi daerah sesuai pembagian yang telah ditetapkan;
f. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program PK IPNU IPPNU yang berada dibawah koordinasinya;
g. Mengevaluasi program-program yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama periode kepengurusan;
h. Membuat *progress report* secara berkala kepada ketua dan/atau rapat pleno mengenai pelaksanaan program bidang organisasi dan daerah binaannya;
i. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi

(1) Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PK IPNU IPPNU;
b. Pemegang kebijakan khusus PK IPNU IPPNU ada bidang kaderisasi;

c. Koordinator pelaksanaan program pada bidang kaderisasi yang telah ditetapkan.

(2) Hak dan wewenang:

a. Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan berdasarkan surat mandat dari ketua, atau keputusan rapat harian;
b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan program pendidikan dan pengembangan kaderisasi;
c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kaitan dengan pendidikan dan pengembangan kaderisasi;
d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK IPNU IPPNU yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;
e. Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan bidang kaderisasi bersama sekretaris atau wakil sekretaris bidang kaderisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, pada bidang kaderisasi;
b. Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas dalam hal ketua berhalangan;
c. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan program kaderisasi;
d. Mengelola dan mengkoordasikan pelaksanaan program-program pada departemen yang dibawahinya;
e. Melakukan pembinaan dan koordinasi daerah sesuai pembagian yang telah ditetapkan;
f. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program PK IPNU IPPNU yang berada dibawah koordinasinya;
g. Mengevaluasi program-program yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama periode kepengurusan;
h. Membuat *progress report* secara berkala kepada ketua dan/atau rapat pleno mengenai pelaksanaan program bidang kaderisasi dan daerah binaannya;
i. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Sekretaris

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PK;

b. Pemegang kebijakan umum sekretariat PK.

(2) Hak dan wewenang:

a. Menentukan manajemen sekretariat;

b. Merumuskan kebijakan umum administrasi organisasi;

c. Bersama ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan organisasi secara umum;

d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;

e. Melaksanakan wewenang tertentu yang dilimpahkan oleh ketua;

f. Bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Memimpin dan mengelola sekretariat;

b. Mendampingi dan bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi;

c. Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi organisasi dan sekretariat;
d. Melaksanakan dan mengendalikan administrasi sehari-hari dan melaksanakan fungsi kerumahtanggaan kantor;
e. Menggali, mengolah, dan menyajikan data dan informasi;
f. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengelola organisasi dan program-program PK
g. Bersama ketua mengevaluasi semua kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama periode kepengurusan;
h. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil – Wakil Sekretaris

(1) Wakil sekretaris adalah pengurus harian yang bertugas membantu sekertaris untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sistem administrasi.
(2) Wakil sekretaris PK sebagai pelaksana kebijakan khusus sekretariat PK, sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.
(3) Dalam kepengurusan PK harus mempunyai wakil sekretaris bidang organisasi dan bidang kaderisasi.

(4) Pimpinan Komisariat diperkenankan menambah wakil sekretaris sesuai dengan kebutuhannya.

Wakil Sekertaris Bidang Organisasi

(1) Status dan kedudukan:
   a. Pengurus harian PK;
   b. Pelaksana kebijakan khusus sekretariat PK, pada bidang organisasi.
(2) Hak dan wewenang:
   a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan berdasarkan surat mandat atau keputusan rapat harian;
   b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola khusus administrasi pada bidang organisasi;
   c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;
   d. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan bidang organisasi, bersama ketua atau wakil ketua bidang organisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu tugas-tugas sekretaris;
b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian pada bidang organisasi;
c. Membantu dan mendampingi tugas wakil ketua bidang organisasi;
d. Bersama wakil ketua bidang organisasi mengevaluasi program yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama periode kepengurusan;
e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Sekertaris Bidang Kaderisasi

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PK;
b. Pelaksana kebijakan khusus sekretariat PK, pada bidang kaderisasi.

(2) Hak dan wewenang:

a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan berdasarkan surat mandat atau keputusan rapat harian;
b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola khusus administrasi pada bidang kaderisasi;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya;

d. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan bidang kaderisasi, bersama ketua atau wakil ketua bidang kaderisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu tugas-tugas sekretaris;

b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian pada bidang kaderisasi;

c. Membantu dan mendampingi tugas wakil ketua bidang kaderisasi;

d. Bersama wakil ketua bidang kaderisasi mengevaluasi program yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama periode kepengurusan;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Bendahara

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PK;

b. Pemegang kebijakan umum keuangan PK.

(2) Hak dan wewenang:

a. Menentukan kebijakan umum keuangan dan sistem pengelolaan keuangan organisasi yang *efisien*, *akuntabel* dan *transparan*;

b. Bersama ketua menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi tahunan dalam satu masa khidmat;

c. Melakukan audit internal terhadap keuangan organisasi;

d. Menandatangani surat-surat berharga milik atau atas nama organisasi, bersama ketua;

e. Meminta laporan keuangan dari panitia pelaksana yang dibentuk PK dan/atau wakil bendahara lainnya;

f. Menandatangani laporan keuangan yang berkenaan dengan biaya pemasukan dan pengeluaran bersama ketua;

g. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Menggali sumber-sumber dana untuk kepentingan organisasi yang halal dan tidak mengikat, dengan persetujuan ketua;

b. Mengembangkan dan mendayagunakan aset-aset PK;
c. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan organisasi dengan sepengetahuan ketua;
d. Melaporkan neraca keuangan organisasi secara berkala kepada di hadapan rapat pleno PK;
e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Bendahara

(1) Status dan kedudukan:
  a. Pengurus harian PK;
  b. Pelaksana kebijakan khusus keuangan PK;
  c. Pimpinan Komisariat diperkenankan mempunyai wakil bendahara lebih dari satu sesuai dengan kebutuhannya.
(2) Hak dan wewenang:
  a. Melaksanakan wewenang bendahara dalam hal bendahara berhalangan berdasarkan surat mandat bendahara atau keputusan rapat harian;
  b. Membantu bendahara dalam melakukan internal audit terhadap keuangan organisasi;
  c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam memberhentikan, mengangkat dan mengganti personil kepengurusan PK yang dianggap

tidak dapat menjalankan tugas organisasi sebagaimana mestinya.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;
b. Melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang kebendaharaan sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan;
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Tata Kerja Departemen, Lembaga dan Badan PK

Departemen

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus pleno PK;
b. Pelaksana program khusus PK.

(2) Hak dan wewenang:

a. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program hasil rapat anggota yang berkaitan dengan departemen yang bersangkutan;
b. Membuat perencanan teknis pelaksanaan kegiatan PK;

c. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program kepada bendahara.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan program kerja PK yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

b. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada rapat pleno PK;

c. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada wakil ketua yang membawahi bidang yang bersangkutan.

(4) Dalam kepengurusan PK harus diadakan departemen pengkaderan, dan departemen organisasi.

(5) PK diperkenankan menambah departemen-departemen lain sesuai kebutuhan dengan jumlah maksimal 4 (empat) departemen.

Lembaga

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus pleno PK;

b. Perangkat semi otonom PK;

c. Pelaksana program PK dalam bidang-bidang yang membutuhkan penanganan khusus.

(2) Hak dan wewenang:

a. Membuat perencanaan program sesuai dengan bidang kerjanya dengan mengacu hasil-hasil rapat anggota;
b. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program kepada bendahara;
c. Membangun jaringan kerja dengan lembaga/instansi lain untuk mendukung pelaksanaan program lembaga;
d. Membuat dan mengelola sistem administrasi secara mandiri dengan tetap mengacu pada Pedoman Administrasi IPNU;
e. Melakukan koordinasi ke tingkatan yang berbeda dengan sepengetahuan ketua PK;
f. Menyelenggarakan rapat koordinasi komisariat untuk membahas hal-hal yang menyangkut tata aturan, agenda dan masalah lembaga secara lokal;
g. Mekanisme rapat koordinasi komisariat akan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Melakukan pengkajian strategis secara terencana dan terarah sesuai dengan bidangnya;
b. Melaksanakan program-program khusus sesuai dengan bidangnya;

c. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada rapat pleno PK;
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Bab II dapat diatur dalam Peraturan Pimpinan Komisariat.

Waka 1 ; *membidangi departemen Orgnisasidan kaderisasi*

Waka 2 ;*membidangi departemen Dakwah dan minat bakat*

D. CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan Pimpinan Komisariat

(1) Di setiap lembaga pendidikan dapat dibentuk Pimpinan Komisariat.
(2) Permintaan untuk mendirikan Pimpinan Komisariat disampaikan kepada Pimpinan Cabang dengan disertai keterangan tentang lembaga pendidikan yang bersangkutan dan jumlah anggota yang ada di lembaga yang bersangkutan.
(3) Pimpinan Cabang memberikan mandat kepada Pimpinan Anak Cabang untuk membentuk kepengurusan Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU.
(4) Apabila Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU di kecamatan yang bersangkutan belum terbentuk,

maka pembentukan Pimpinan Komisariat bisa dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan, terutama jika lembaga pendidikan dimaksud berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, RMI atau lembaga-lembaga NU lainnya.

(5) Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU dan/atau pimpinan lembaga yang bersangkutan melaporkan pembentukan PK dan memberikan rekomendasi kepada PC IPNU IPPNU untuk menerbitkan Surat Pengesahan tentang kepengurusan PK IPNU IPPNU yang bersangkutan.

(6) Setelah mempelajari susunan kepengurusan PK yang bersangkutan, Pimpinan Cabang berkewajiban mengesahkan kepengurusan PK dengan menerbitkan Surat Pengesahan.

E. PENGESAHAN

Permohonan Pengesahan

(1) Setelah selesainya Rapat Anggota, pengurus PK yang terbentuk mengajukan permohonan rekomendasi tentang pengesahan susunan pengurus Pimpinan Komisariat yang bersangkutan kepada Pimpinan Anak Cabang.

(2) Pengurus PK yang terbentuk selanjutnya mengajukan surat permohonan pengesahan tentang kepengurusan Pimpinan Komisariat yang bersangkutan kepada Pimpinan Cabang.

(3) Surat permohonan pengesahan harus disertakan lampiran:

a. berita acara dan/atau surat keputusan Rapat Anggota tentang pemilihan ketua Pimpinan Komisariat;
b. berita acara penyusunan kepengurusan oleh tim formatur komisariat;
c. susunan kepengurusan Pimpinan Komisariat lengkap;
d. surat rekomendasi pengesahan Pimpinan Anak Cabang;
e. surat rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan (jika diperlukan).

(4) Surat permohonan pengesahan ditandatangni oleh Ketua Komisariat terpilih hasil Rapat Anggota dan Sekretaris yang dipilih melalui rapat tim formatur.

(5) Surat permohonan pengesahan ditembuskan kepada Pimpinan Anak Cabang.

(6) Bentuk dan format surat permohonan pengesahan sebagaimana surat umum yang telah diatur dalam

Peraturan Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi IPNU IPPNU.

Rekomendasi Pengesahan

(1) Setelah menerima pengajukan rekomendasi pengesahan dan mempelajari seperlunya susunan kepengurusan, Pimpinan Anak Cabang menerbitkan surat rekomendasi pengesahan tentang kepengurusan Pimpinan Komisariat yang bersangkutan.
(2) Surat rekomendasi pengesahan sebagaimana ayat (1) dikirimkan kepada Pimpinan Cabang.
(3) Surat rekomendasi pengesahan sebagaimana ayat (1) ditembuskan kepada Pimpinan Komisariat yang bersangkutan, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat, dan pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
(4) Bentuk dan format surat rekomendasi pengesahan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi IPNU IPPNU.

Pengesahan

(1) Setelah menerima pengajuan pengesahan dan surat rekomendasi pengesahan, serta mempelajari sungguh-sungguh susunan kepengurusan, Pimpinan Cabang

menerbitkan surat pengesahan tentang Pimpinan Komisariat yang bersangkutan.

(2) Surat pengesahan dikirim kepada Pimpinan Komisariat yang bersangkutan.

(3) Surat pengesahan ditembuskan kepada Pimpinan Cabang setempat, Pimpinan Anak Cabang setempat, dan pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

(4) Surat pengesahan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang dengan tanda tangan dan stempel basah.

(5) Bentuk dan format surat pengesahan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi IPNU IPPNU.

(6) Jika semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi, Pimpinan Cabang wajib menerbitkan surat pengesahan.

(7) Dalam hal kepengurusan Pimpinan Komisariat yang besangkutan bermasalah dan/atau persyaratan pengajuan belum lengkap, Pimpinan Cabang berhak tidak menerbitkan surat pengesahan sampai masalah selesai dan/atau semua syarat-syarat pengajuan dipenuhi.

F. PELANTIKAN

Penyelenggaraan Pelantikan

(1) Upacara pelantikan pada dasarnya diselenggarakan dalam suatu acara formal yang khusus dilakukan untuk itu.

(2) Jika ayat (1) tidak terpenuhi, upacara pelantikan bisa digabung dengan acara lainnya, selama tidak mengurangi kehidmatan upacara.

Manual Acara Pelantikan

Upacara pelantikan pada dasarnya terdiri dari beberapa acara berikut:

a. pembukaan;
b. pembacaan ayat suci al-Qur'an dan sholawat nabi;
c. lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mars IPNU IPPNU;
d. acara inti pelantikan;
e. serah terima jabatan;
f. pidato sambutan;
g. do'a dan penutup.

Lagu Kebangsaan dan Mars IPNU IPPNU

(1) Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IPNU IPPNU sebagaimana dimaksud pasal 8 poin c dinyanyikan oleh semua peserta dan/atau dinyanyikan oleh kelompok paduan suara dengan dipandu oleh seorang dirigen.
(2) Pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IPNU IPPNU dinyanyikan, hadiri diminta untuk berdiri.

Acara Inti Pelantikan

(1) Acara inti pelantikan berisi pembacaan surat pengesahan, pengambilan ikrar pengurus, dan penyataan pelantikan.

(2) Seluruh acara inti pelantikan sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh pelantik.

(3) Pelantik membacakan surat pengesahan tentang kepengurusan yang akan dilantik beserta susunan pengurus lengkap.

(4) Pelantik selanjutnya memanggil semua pengurus yang menjadi peserta pelatikan untuk maju ke tempat pelantikan.

(5) Peserta pelantikan berbaris menghadap kehadirin dengan ketua berada dibarisan paling kanan.

(6) Pelantik membacakan ikrar pelantikan yang diikuti oleh segenap peserta pelantikan.

(7) Setelah pembacaan ikrar, pelantik selanjutnya mengucapkan pernyataan pelatikan yang berbunyi: ”Dengan ini pimpinan (disebutkan tingkat kepengurusan) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama / Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (disebutkan nama daerah kerjanya) dinyatakan dilantik dan sah menjadi pengurus”.

(8) Pada saat pengambilan ikrar dan pernyataan pelantikan, semua hadirin berdiri.

(9) Acara pelantikan sebaiknya diakhiri ucapan selamat dengan jabat tangan dari pelantik dan tamu undangan seperlunya.

Serah Terima Jabatan

(1) Serah terima dilakukan dengan penyerahan secara simbolik dan/atau dengan penandatangan berita acara serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru.
(2) Penyerahan dan penandatangnan disaksikan oleh pengurus NU setempat, pelantik dan/atau pimpinan di atasnya.

Pidato Sambutan

Pidato sambutan adalah sambutan oleh ketua terlantik, kepala sekolah, pelantik atau pimpinan di atasnya, serta jika diperlukan pejabat pemerintah pada daerah yang bersngkutan.

Pembacaan Do'a

Pembacaan do'a dipimpin oleh seorang kyai dan sebaiknya berisi doa untuk mendukung pengurus yang bersangkutan agar dapat menjalankan tugas organisasi.

Ikrar Pengurus

(1) Pada setiap pelantikan, pengurus yang dilantik harus membaca ikrar pengurus.

(2) Ikrar sebagaimana ayat (1) berbunyi:

Bismillahirahmanirrahim
Asyhadu an laa ilaaha illa Allah,
Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Rodlitu billahi robbaa wabil Islaami diinaa,
Wa bi Muhammadi nabiyyan warosuulaa.

Kami sebagai pengurus ....(sebutkan tingkatan kepengurusan) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama/ Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama .... (sebutkan nama daerah kerjanya) dengan sadar dan penuh tanggungjawab dengan ini menyatakan :

Satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berpaham *ahlussunnah wal jama'ah* di tengah-tengah masyarakat.

Dua, siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila.

Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

Empat, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.

Lima, taat dan patuh kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama/ Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.

La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim

(2) Pembacaan ikrar sebagaimana ayat (2) dipandu oleh pelantik dan diikuti oleh semua peserta pelantikan.

BAB III
TEKNIS PENDIRIAN KOMISARIAT

A. DASAR PEMIKIRAN

Alasan-alasan perlunya didirikan Pimpinan Komisariat (PK) IPNU-IPPNU,

1. IPNU-IPPNU merupakan Badan Otonom yang memiliki fokus ruang gerak di lingkungan pelajar dan santri, sehingga untuk memaksimalkan peran IPNU-IPPNU sangat perlu diadakan kepengurusan komisariat.
2. IPNU-IPPNU merupakan tonggak awal pengenalan ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah dan NU, karena bidang garapnya berkonsentrasi pada pelajar dan santri, sehingga perlu adanya wadah yang kuat yaitu komisariat IPNU-IPNU.
3. IPNU-IPPNU merupakan ujung tombak kaderisasi NU secara berjenjang dari paling dasar yang kemudian dilanjutkan di GP Anshor NU, Fatayat NU, Muslimat NU hingga NU secara struktural atau melanjutkan ke banom-banom lain, pendirian komisariat menjadi penting, sebab kader-kader IPNU-IPPNU lah nanti yang akan meneruskan perjuangan NU dan Aswaja di masa yang akan dating
4. IPNU-IPPNU perlu diberikan support di sekolah, sebab dengan begitu, penanaman ideologi Aswaja ala NU serta kegiatan-kegiatan yang berafiliasi dengan NU dapat lebih

mudah dilaksanakan jika terdapat kepengurusan Komisariat di sekolah.

5. IPNU-IPPNU memiliki struktur yang sistematis dari tingkat paling dasar (ranting/komisariat) hingga pimpinan pusat, sehingga koordinasi dan pembimbingan dapat dilakukan secara sistematis dan berjenjang baik.
6. Banyaknya aliran-aliran non-Aswaja yang mulai merambah di kalangan pelajar dan pemuda yang tidak disadari secara perlahan membawa para pelajar dan pemuda masuk ke ideologi non-Aswaja tersebut, kehadiran Pimpinan Komisariat menjadi penting sebagai benteng struktural bagi anggota komisariat di sekolah maupun.
7. Komisariat IPNU-IPPNU juga memiliki program-program keterpelajaran dan struktur yang rapi, tidak kalah dengan organisasi pelajar lain seperti OSIS atau Dewan Kerja Ambalan Pramuka.
8. Komisariat IPNU-IPPNU tetap dapat berkolaborasi dengan organisasi keterpelajaran lain dengan proporsional dan profesional. Mari sukseskan gerakan sekolah dan pesantren NU ber-Komisariat..!!!

B. POSISI PIMPINAN KOMISARIAT

Penempatan Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU tentunya atas kebijakan dari kepala lembaga pendidikan. Secara umum posisi Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU adalah sebagai berikut,

Posisi Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU di Sekolah/Lembaga Pendidikan

1. PK IPNU-IPPNU sebagai organisasi pelajar utama di sekolah Pada posisi ini, organisasi pelajar yang utama di sekolah diperankan oleh PK IPNU-IPPNU, sehingga tidak ada OSIS. Struktur kepengurusan PK IPNU-IPPNU dapat diterapkan secara sempurna, serta kegiatan-kegiatan yang berafiliasi dengan IPNU-IPPNU serta NU dapat dimaksimalkan intensitasnya. Pada posisi ini, PK IPNU-IPPNU dapat mengambil peran sentral tentang penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah. Metode ini telah di terapkan dibeberapa sekolah salah satunya di **SMK Wachid Hasyim Maduran Babat Lamongan.**
2. PK IPNU-IPPNU sebagai organisasi ekstra di sekolah pada posisi ini, PK IPNU-IPPNU merupakan wadah ekstrakurikuler yang ada di sekolah, hampir sama halnya dengan Dewan Kerja Ambalan Pramuka yang merupakan wadah dari ekstrakurikuler pramuka. PK IPNU-IPPNU tetap dapat melakukan berbagai kegiatan IPNU-IPPNU dengan porsi sebagai ekstrakurikuler, hanya saja susunan kepengurusan tidak dapat diterapkan secara sempurna. PK IPNU-IPPNU pada posisi ini sebagai motor dari ekstrakurikuler keagamaan, sehingga seolah-olah lembaga pendidikan memiliki ekstrakurikuler ke-IPNU-IPPNUan. Metode ini telah di

terapkan dibeberapa sekolah salah satunya di **MAN 4 Jombang.**

C. MEKANISME KOORDINASI

Mekanisme koordinasi untuk Pimpinan Komisariat di sekolah adalah sebagai berikut,

1. Untuk PK IPNU-IPPNU yang menjadi organisasi utama di sekolah
   a. Jalur PK IPNU-IPPNU kepada kepala sekolah bersifat konsultif, sedangkan jalur kepala sekolah kepada pengurus PK IPNU-IPPNU bersifat instruktif (perintah).
   b. Jalur PK IPNU-IPPNU kepada PAC IPNU-IPPNU bersifat konsultif, sedangkan PAC IPNU-IPPNU kepada PK IPNU-IPPNU bersifat koordinatif (pembimbingan dan koordinasi).
   c. Jalur PAC IPNU-IPPNU kepada kepala sekolah bersifat koordinatif begitu pula sebaliknya.
   d. Untuk hal-hal khusus, maka koordinasi dapat langsung kepada pengurus PC IPNU-IPPNU.
2. Untuk PK IPNU-IPPNU yang menjadi organisasi ekstrakurikuler di sekolah
   a. Jalur PK IPNU-IPPNU kepada kepala sekolah bersifat konsultif, sedangkan jalur kepala sekolah kepada pengurus PK IPNU-IPPNU bersifat instruktif (perintah)

b. Jalur PK IPNU-IPPNU kepada pembina IPNU-IPPNU bersifat konsultif, sedangkan jalur pembina IPNU-IPPNU kepada PK IPNU-IPPNU bersifat instruktif (perintah).
c. Jalur pembina IPNU-IPPNU kepada kepala sekolah bersifat konsultif, sedangkan jalur kepala sekolah kepada pembina IPNU-IPPNU bersifat instruktif (perintah).
d. Jalur PK IPNU-IPPNU kepada PAC IPNU-IPPNU bersifat konsultif, sedangkan PAC IPNU-IPPNU kepada PK IPNU-IPPNU bersifat koordinatif (pembimbingan dan koordinasi).
e. Jalur PAC IPNU-IPPNU kepada kepala sekolah dan pembina IPNU-IPPNU bersifat koordinatif begitu pula sebaliknya.
f. Untuk hal-hal khusus, maka koordinasi dapat langsung kepada pengurus PC IPNU-IPPNU.

D. REKRUITMEN ANGGOTA

Untuk rekruitmen anggota di komisariat dapat dilakukan dalam tahap-tahap berikut,

1. Rekruitmen Anggota Komunitas

   Rekruitmen anggota komunitas dapat dilakukan dengan penyelenggaraan acara-acara IPNU-IPPNU oleh PAC/PC IPNU-IPPNU di lembaga pendidikan setempat atau penggerak orientasi (pengenalan) IPNU-IPPNU dilembaga

baik itu dilakukan secara mandiri maupun dengan dukungan dari PAC/PC IPNU-IPPNU.

2. Rekruitmen Anggota

   Rekruitmen anggota tetap IPNU-IPPNU dapat dilakukan dengan cara,

   a. Mengadakan Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) di lembaga yang bersangkutan selama 3 hari (ideal) atau 2 hari (minimal).
   b. Mengirimkan delegasi untuk mengikuti MAKESTA yang diadakan di tempat lain (PR/PAC IPNU-IPPNU).
   c. Mengirimkan delegasi pada Pendidikan dan Latihan Pertama (DIKLATAMA) CBP-KPP (otonom IPNU-IPPNU yang bergerak di bidang kepanduan dan kemanusiaan) yang diadakan oleh DKAC/DKC CBP-KPP karena sesuai dengan PDKW dan peraturan yang terkait, bahwa lulusan DIKLATAMA setara dengan lulusan MAKESTA dan disahkan sebagai anggota tetap IPNU-IPPNU.

E. SUSUNAN KEPENGURUSAN PK

1. Untuk PK IPNU-IPPNU yang menjadi organisasi utama, maka susunan PK IPNU-IPPNU hendaknya dilengkapi sesuai aturan atau dapat digabungkan 2 (dua) departemen menjadi 1 (satu) departemen dan lembaga serta badan sesuai kebutuhan.

2. Untuk PK IPNU-IPPNU yang menjadi organisasi ekstra/mitra, maka susunan PK IPNU-IPPNU sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara serta anggota.

F. MEKANISME PENGAJUAN SURAT PENGESAHAN

Sebagai legalitas akan berdirinya Pimpinan Komisariat Sekolah maka kiranya perlu untuk memiliki Surat Pengesahan (SP) adapun mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapatkan SP adalah :

1. Membuat berita acara pemilihan ketua
2. Membuat berita acara rapat formatur
3. Membuat susunan Pengurus
4. Mendapat rekomendasi dari Kepala Madrasah / Sekolah
5. Membuat surat permohonan rekomendasi ke pengurus PAC IPNU IPPNU setempat
6. Membuat Surat permohonan penerbitan SP
7. Melampirkan CV, Sertifikat Makesta Ketua, Sekretaris dan Bendahara
8. SP terbit

G. REKOMENDASI TAMBAHAN

1. Hendaknya Lembaga Pendidikan Maarif NU yang menjadi penggerak dari pendidikan di lingkungan NU juga berkontribusi aktif untuk pendirian komisariat IPNU-IPPNU agar program-program NU dapat seiring sejalan.

2. Dalam menguatkan sinergitas dan keseriusan hubungan IPNU-IPPNU dengan PC. LP. Ma'arif perlu adanya kontrak tertulis berupa Form MoU untuk menguatkan langkah IPNU-IPPNU dalam memasuki lembaga pendidikan.
3. Hendaknya tokoh, pengurus maupun anggota NU yang memiliki lembaga pendidikan untuk tidak sungkan-sungkan mendirikan komisariat IPNU-IPPNU sesuai dengan pilihan posisi komisariat yang diinginkan. Setidaknya ini merupakan awal dari kaderisasi penerus pejuang Aswaja NU di Indonesia secara berkesinambungan.
4. Hendaknya pelajar-pelajar NU untuk digalakkan mengenakan badge IPNU (putra) dan badge IPPNU (Putri) baik dipasangkan di saku maupun di lengan. Ini menjadi identitas ke-NU-an serta pengenalan NU kepada pelajar, syiar seperti ini penting untuk penanaman rasa memiliki dan bangga sebagai warga NU, kader IPNU-IPPNU.

H. STRATEGI PERAWATAN KADER

Pimpinan Komisariat Sekolah menjadi starting points bagi IPNU IPPNU untuk terus meningkatkan dan mengembangkan organisasi di Sekolah, terlebih dari pada itu pengurus IPNU IPPNU juga mempunyai tanggung jawab membina dan mengembangkan potensi atau skill dari para siswa. Seringkali yang kita alami setelah melaksanakan kegiatan kaderisasi baik formal maupun informal adalah kita lupa menutup pintu

belakang, itulah kelemahan kita sehingga dalam realitanya banyak peserta atau anggota yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut. Untuk itu membina dan merawat kader adalah suatu hal yang harus dilakukan bagi pengurus IPNU IPPNU.

Adapun strategi perawatan yang bisa menjadi opsi untuk dilakukan adalah dengan :

1. Pendampingan teman sebaya

   Hal itu bisa dilakukan dengan cara diskusi, yang diawali dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil setiap kelompok yang berdasarkan usia sebaya mereka dapat membahas dan mengkaji tentang berbagai hal, selain itu dengan pendampingan teman sebaya para siswa secara psikologis dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan potensi yang dimiliki.

2. Penyiapan jenjang kaderisasi formal

   Sesuai konsesensus awal bahwa MOP adalah pijakan awal yang juga menjadi pijakan awal bagi para siswa untuk masuk dalam IPNU IPPNU, selain itu juga merupakan persiapan awal yang untuk selanjutnya memproyeksikan para siswa untuk mengikuti program kaderisasi formal IPNU IPPNU.

BAB IV

BENTUK KEGIATAN

A. MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota)

1. Pengertian

   Masa Kesetiaan Anggota, selanjutnya disebut MAKESTA, adalah Pelatihan jenjang awal dalam sistem kaderisasi formal IPNU-IPPNU sekaligus menjadi persyaratan untuk menjadi anggota IPNU-IPPNU yang sah. Dalam pelatihan ini diorientasikan untuk melakukan ideologisasi pada anggota baru.

2. Tujuan

   a. Secara umum pelatihan ini bertujuan sebagai gerbang awal untuk menguatkan komitmen keanggotaan setelah dilakukan rekrutmen calon anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlotul Ulama, sehingga diharapkan memiliki kesetiaan kepada organisasi melalui pengenalan organisasi IPNU-IPPNU kepada calon anggota yang diarahkan kepada perubahan mentalitas, keyakinan dan sikap persaudaraan serta kecintaan kepada organisasi. Secara khusus pelatihan ini diarahkan untuk; Menumbuhkan keyakinan tentang kebenaran Islam Ahlus-sunnah waljamaah sebagai

satusatunya system yang berkesinambungan untuk melanjutkan da'wah islamiyah;

b. Memberikan pemahaman tentang NU sebagai wadah perjuangan Islam Ahlussunnah Waljamaah di Indonesia;
c. Meyakinkan kepada calon anggota bahwa IPNU-IPPNU merupakan organisasi pelajar yang tepat sebagai sarana perjuangan da'wah Islamiyah;
d. Mengenal dan memahami organisasi IPNU-IPPNU sebagai Banom NU serta memahami isi materi organisasi IPNU-IPPNU (PD/PRT, PO dan lain lain);
e. Menumbuhkan wawasan dan kemampuan dasar berorganisasi.

3. Output
   a. Anggota yang faham nilai keislaman dan perjuangan Islam yang dikembangkan dan diperjuangkan oleh NU melalui ideologi islam alam ahlussunnah wal jamaah.
   b. Peserta menjadi anggota resmi dan melibatkan diri di kegiatan IPNU-IPPNU.
   c. Anggota faham tentang gerakan IPNU-IPPNU dan hubungannya dengan NU, Badan Otonom serta Lembaga NU.

d. Anggota mempunyai kesadaran tinggi akan pentingnya organisasi.
e. Anggota faham tentang cara berorganisasi yang baik.

4. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Makesta
   a. Anggota dapat menjelaskan dan melaksanakan nilai-nilai keislaman ahlussunnah waljamaah dan organisasi NU sebagai wadah perjuangannya.
   b. Memiliki sertifikat dan atau KTA
   c. Anggota dapat menjelaskan keberadaan dan perjuangan IPNU-IPPNU.
   d. Anggota aktif terlibat dalam kegiatan IPNU-IPPNU.
   e. Anggota dapat mengartikulasikan gagasan dengan baik
   f. Nuansa persaingan sehat antar peserta/ /kelompok untuk menjadi yang terbaik di MAKESTA semakin ketat, sehingga mereka berlomba untuk menjadi yang terbaik diantara peserta MAKESTA.
5. SOP Penyelenggara
   a. Penyelenggara Makesta adalah Pimpinan Anak Ranting (PAR), Pimpinan Ranting (PR), atau

Pimpinan Komisariat (PK), atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT).

b. Jika belum mampu, maka diselenggarakan secara bersama-sama oleh beberapa PR atau PK/PKPT.
c. Jika Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat belum terbentuk atau tidak mampu, maka MAKESTA boleh diselenggarakan oleh PAC sampai tingkat PC jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan.

6. SOP Peserta
   a. Peserta makesta adalah siswa, santri, mahasiswa dan remaja secara umum.
   b. Peserta yang berumur minimal 13 tahun (Kelas VII SMP/MTs).
   c. Peserta sebanyak-banyaknya berjumlah 50 orang dalam satu kelas/ forum.
   d. Jika peserta lebih dari 50 orang penyelenggaraannya dibagi dalam beberapa kelas.
7. SOP Pelaksanaan
   a. Panitia menetapkan jadwal selama kegiatan.
   b. Peserta melakukan registrasi ulang dengan mengisi daftar hadir dan formulir pendaftaran.
   c. Panitia dan peserta melakukan pembukaan yang dihadiri oleh pengurus, tamu undungan dan para

senior secara formal beserta penyematan tanda peserta.

d. Peserta didampingi tim instruktur melakukan pengenalan, kontrak forum dan orientasi awal pelatihan.
e. Panitia/instruktur melakukan pretest kepada peserta.
f. Pelaksanaan makesta dilakukan secara doktrinisasi.
g. Peserta mengikuti materi demi materi sampai selesai dan instruktur melakukan review dari materi ke materi yang lain.
h. Pelaksanaan harus mampu membentuk kultur NU (Sholat dilakukan berjamaah, Sholat Sunnah Dhuha dan Tahajud menjadi keharusan, melaksanakan Tahlil, Yasin dan Istighotsah, diajak ziarah kubur).
i. Pelaksanaan Makesta dilaksanakan secara gembira dan bermakna (Bernyanyi Yalal Wathon, Mars IPNU, Mars IPPNU, Tepuk-Tepuk, Outbound, Inagurasi, sebelum dan sesudah materi diawali dengan berdoa dan kirim fatihah kepada muassis NU dan IPNU-IPPNU).
j. Pelaksaaan Makesta harus terdapat Pembaiatan Anggota, teks sebagaimana terlampir.

k. Pelaksanaan diakhiri dengan post-tes dan evaluasi tiga arah yaitu, panitia, peserta dan instruktur/pemateri.
l. Panitia dan instruktur menyiapkan rencana tindak lanjut/ instruksi anggota
m. Panitia dan peserta bersama-sama melakukan penutupan dengan acara yang mengesankan (pemberian hadiah, pemutaran film dokumnter, dll).

8. SOP Materi
   a. Materi makesta yang wajib dilaksanakan di makesta adalah 7 materi, yaitu: 1) Ahlu Sunnah Wal Jama'ah I; 2) Ke-NU-an I; 3) Ke-IPNU-an I; 4) Ke-IPPNU-an 1; 5) Ke-Indonesia-an I; 6) Tradisi Keagamaan NU; 7) Keorganisasian.
   b. Materi disampaikan minimal 60 menit.
   c. Materi makesta harus disesuaikan dengan silabus dan kisi-kisi materi.
   d. Penyelenggara bisa menambah materi/prosesi sesuai kebutuhan (Local Wisdom).

B. MOP (Masa Orientasi Peserta Didik Baru)

1. Pengertian

Masa orientasi pelajar adalah masa yang digunakan untuk pengenalan siswa baru terhadap

lingkungan sekolah atau madrasah baik secara fisik ataupun secara sosial dengan berbagai hal yang ada di dalam lembaga, yang bertujuan untuk peserta didik mampu beradaptasi di dalam lingkungan pembelajaran yang baru.

Masa orientasi pelajar juga sebagai wahana untuk membentuk karakter pelajar yang beridiologi keaswajaan yang kental. sehingga siswa yang baru masuk kedalam lembaga lebih jauh mengenal idiologinya. Dan juga melatih keterampilan pelajar dalam berorganisasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekolah melalui organisasi keterpelajaran di lingkup sekolah yakni IPNU-IPPNU.

Sedikit mengaca dari organisasi intra sekolah lain „"OSIS"" yang bernaungan di sekolah sekolah pada umumnya, memiliki proses dalam perkenalan lingkungan sekitar sekolah biasanya disebut MOS. Akan tetapi MOP hanya dimiliki oleh sekolah/lembaga di bawah naunggan PC. LP Ma`arif NU yang sudah berdiri komisariat IPNU-IPPNU.

2. Nama Dan Bentuk Kegiatan

Nama : Masa Orientasi Pelajar (MOP)

Kegiatan : Pengenalan Sekolah

3. Tujuan

   Membentuk pelajar/siswa baru yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah demi tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal serta meneguhkan idiologi ke-Aswaja-an melalui organisasi IPNU-IPPNU.

4. Target

   Setelah mengikuti kegiatan MOP, peserta didik diharapkan mampu :

   a. Beradaptasi dengan lingkungan sekolah
   b. Memperdalam idiologi Ke-Aswaja-An
   c. Mengenali IPNU-IPPNU sebagai organisasi keterpelajaran disekolah.

5. Pelaksana Dan Peserta

   a. Pelaksana Masing-masing sekolah. Baik SMP/MTs/SMA/SMK/MA sederajat yang ada dilingkungan PW. LP MA‟ARIF NU JATIM, secara teknis berkordinasi dengan Tim fasilitator/trainer dari PAC IPNU-IPPNU setempat.
   b. Peserta Pelajar baru yang mencari ilmu di sekolah yang ada di lingkungan LP. MA‟ARIF.

6. Bentuk Kegiatan

Ada beberapa bentuk menu pelaksanaan MOP, hal ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi dengan penyelenggara, hal tersebut antara lain:

a. MENU A : Pelaksanaan MOP ditangani secara total oleh tim kaderisasi PAC. IPNU-IPPNU setempat. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari, dengan teknis kegiatan sebagaimana terlampir.
b. MENU B : Pelaksanaan MOP ditangani tim kaderisasi PAC. IPNU-IPPNU setempat beberapa hari dari tiga hari yang telah ditentukan. Teknik setelahnya diserahkan oleh sekolah/lembaga yang bersangkutan.
c. MENU C : Pelaksanaan MOP ditangani oleh tim kaderisasi PAC. IPNU-IPPNU setempat yang hanya menangani beberapa materi yang telah ditentukan oleh sekolah/lembaga yang bersangkutan.
d. MENU D : Pelaksanaan MOP ditangani oleh tim kaderisasi PAC. IPNU-IPPNU Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari Tekniknya dari lembaga/sekolah, PAC mengawal jalanya acara tersebut.

7. Desain Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan MOP adalah media perkenalan lingkungan sekeliling secara mendalam dan sebagai media penguatan ideologi ke-NU-an bagi peserta didik baru di masing-masing sekolah/lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun bentuk kegiatan tersebut antara lain;

- Observasi lingkungan sekolah/madrasah maupun sosial
- Pendidikan ideologi serta karakter dengan beberapa tugas mandiri
- Kompetisi pengembangan potensi diri
- Menggunakan metode yang aktif, menyenangkan dan mendidik

8. Jadwal Pelatihan

Adapun jadwal dan skema pelatihan pelaksanaan Masa Orientasi Pelajar (MOP) menyesuaikan dengan pelaksanaan MOP itu sendiri.

NO	HARI/JAM	MATERI	PELAKSANA
1.	07.00 – 08.00	Pembukaan/Apel pagi	Panitia
2.	08.00 – 09.30	Dinamika kelompok dan kontrak belajar	Panitia

3.	09.30 – 10.00	Istirahat	All
4.	10.00 – 11.00	Kepribadian pelajar	Trainer
5.	11.00 – 12.00	Materi ke IPNU an	Pemateri
6.	12.00 – 12.30	Sholat dzuhur berjama`ah	Panitia
7.	12.30 – 13.30	Materi ke IPPNU an	Pemateri
8.	13.30 – 14.30	Pengumuman/Arahan panitia	Panitia
Tugas membawa logo IPNU-IPPNU			
1.	06.30 – 07.00	Apel pagi	Panitia
2.	07.00 – 08.00	Teknik belajar	Trainer
3.	08.00 – 09.30	Materi ke-NU-an dan ke-ASWAJA-an	Trainer
4.	09.30 – 10.00	Istirahat	All
5.	10.30 – 11.00	Wawasan Wiyata Mandala	Pemateri
6.	11.00 – 12.00	Organisasi dan Ice breaking	Trainer
7.	12.00 – 12.30	Sholat dzuhur berjama`ah	Panitia
8.	12.30 – 14.00	Review materi	Trainer
Pemberian tugas harian			
1.	06.30 – 07.00	Apel pagi	Panitia
2.	07.00 – 08.30	Character building	Trainer
3.	08.30 – 10.00	Materi Bahaya kenakalan remaja	Pemateri
4.	10.00 – 10.30	Istirahat	All
5.	10.30 – 11.30	Game/Out bound	Trainer

6.	11.30 – 12.00	Gugus competition	Trainer
7.	12.00 – 12.30	Sholat dzuhur berjama`ah	Panitia

9. MODUL & MATERI MOP (Masa Orientasi Pelajar)
   a. Tujuan : Bagian dari pelatihan yang diharapkan tercapai selama proses pelatihan
   b. Motivasi : Bagian dari pelatihan yang didalamnya diberi muatan : Pre-test, perkenalan, review pengalaman, analisa diri dan kontrak belajar dengan harapan dapat memacu, mendorong dan menstimulasi peserta kea rah pembentukan kesadaran diri
   c. Penguatan Ideologi : Bagian dari pelatihan yang didalamnya diberi muatan ; Ke-IPNU-an, Ke-IPPNU-an, Ke-NU-an, Ke-Aswaja-an serta tradisi perilaku keagamaan NU dengan harapan terjadi pertumbuhan dan penguatan Ideologi bagi anggota IPNU-IPPNU.
   d. Pembentukan Skill Pelajar : Bagian dari pelatihan yang didalamnya diberi muatan materi: Teknik belajar yang baik, pengenalan lingkungan sekolah, Kepribadian pelajar dan keorganisasian.

e. Evaluasi : Bagian dari pelatihan yang dijadikan tolak ukur dari proses pelatihan secara menyeluruh
f. Rencana Tindak Lanjut : proses perencanaan terhadap kegiatan pasca latihan yang diharapkan mampu menjembatani kegiatan berikutnya
g. Target : merupakan komponen yang menjadi tujuan akhir latihan, kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan target yang diharapkan seharusnya pada akhir latihan ini sudah dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Buku Modul ini merupakan upaya untuk lebih memudahkan penyelenggaraan Pimpinan Komisariat di masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi masing-masing sekolah dan dapat menjadi awal bagi peserta didik baru dalam ikut mensukseskan pendidikan karakter. Buku Modul ini akan lebih berarti apabila diikuti peran aktif dan kreatif kepala sekolah dan unsur sekolah lainnya serta dukungan orang tua, masyarakat, dan pihakpihak yang terlibat. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya Pimpinan Komisariat yang baik, dapat membantu sekolah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagai wujud pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar.

CATATAN :

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

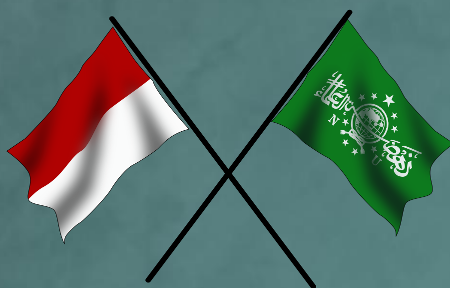
....

....

....

....

....





PIMPINAN WILAYAH
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
JAWA TIMUR